



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 359/BUA.4/PL1.2.1/VIII/2025 Jakarta, 15 Agustus 2025
Sifat : Terbatas
Hal : Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara (RKBMN) TA 2027
melalui Aplikasi SIMAN.

- Yth. 1. Para Sekretaris pada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2025 perihal Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, bersama ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja bahwa dalam pengajuan usulan RKBMN melalui aplikasi SIMAN agar memastikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan kerja dapat mengajukan usulan RKBMN pada tanggal 20 – 26 Agustus 2025 melalui modul perencanaan SIMAN sesuai hasil Konsolidasi Tingkat Banding;
2. Memastikan usulan RKBMN yang diajukan sesuai dengan Berita Acara Hasil Konsolidasi Tingkat Banding dan hasil catatan tambahan dari masing-masing Tim Pendamping Biro Perlengkapan yang dapat diunduh melalui tautan <https://s.id/KonsolTingkatBandingRKBMNTA2027>;
3. Satuan kerja agar menginput kekurangan dakung sebagaimana telah disampaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Tim Pendamping pada saat Konsolidasi Tingkat Banding;
4. Dalam pengusulan RKBMN, satuan kerja diwajibkan mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang dan bermaterai.
5. Dalam pengajuan usulan kendaraan fungsional, satuan kerja wajib melampirkan data dukung tambahan berupa Naskah Urgensi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang.

6. Dalam pengajuan usulan rumah negara berbentuk tapak maupun susun/flat, satuan kerja wajib melampirkan data dukung tambahan berupa analisa kebutuhan unit rumah negara dari Dinas PUPR setempat.
7. Selain usulan pada poin 2, satuan kerja juga mengusulkan rencana pengasuransian BMN pada tiket yang sama;
8. Objek BMN yang diusulkan dalam rencana pengasuransian BMN adalah bangunan gedung kantor yang digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi satuan kerja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan



Ditandatangani secara elektronik

Rosyidatus Syarifeini

Tembusan:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal pada Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengaduan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
6. Para Ketua Pengaduan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

